

ANALISIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI BALI

Ni Made Dwi Ratnadi ¹⁾, Dodik Ariyanto ²⁾, Ni Gusti Putu Wirawati ³⁾

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana

ABSTRACT

Ministerial of Home Affairs decree number 13/2006 about regional management guidelines stressed that a unit of work related must first be classifying expenditure by a direct and an indirect. Direct expenditure generally pertaining the government investment that implicates directly to the public interest. The objectives of this research were to analyze the effect of direct expenditure on economic growth, and the influence of direct expenditure, economic growth on poverty reduction in province of Bali.

The research was done in nine districts in Bali. The Data is taken from financial statement during 2010 to 2014. The sample were 45 observation. The two stage least square regression was used to analysis the data.

The empirical result show that direct expenditure have positive effect on economic growth. Economic growth have a negative influence on the level of poverty and direct spending have a negative influence on the level of poverty. Thus, the higher allocation direct expenditure on the local budget causing the higher the economic growth level so that it can be alleviate poverty

Keywords: Direct expenditure, economic growth, poverty, indirect expenditure

ABSTRAK

Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa unit kerja terkait terlebih dahulu harus mengelompokkan belanja menjadi langsung dan tak langsung. Belanja langsung umumnya berkaitan dengan investasi pemerintah yang berimplikasi langsung pada kepentingan rakyat. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh belanja langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengaruh belanja langsung, pertumbuhan ekonomi pada pengentasan kemiskinan di provinsi Bali.

Penelitian dilakukan di sembilan kabupaten/ kota di provinsi Bali. Data yang dianalisis adalah data sekunder yang dikutip dari laporan tahunan. Sampel penelitian berjumlah 45 amatan dari tahun 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi dua tahap (two stage least square). Untuk menegaskan hasil penelitian dilakukan wawancara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan dan belanja langsung berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Dengan Demikian, semakin tinggi alokasi belanja langsung pada APBD menyebabkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat pengurangi atau mengentaskan tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Belanja tidak langsung

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki tercermin dari kebijakan pemerintah daerah selaku perencana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang dibuat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran harus merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat (Mahmudi, 2007). Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Keputusan anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan provinsi seharusnya merefleksikan prioritas pemerintah daerah atau provinsi dengan baik. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain memuat mekanisme penyusunan anggaran dengan Performance based budgeting atau anggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran kinerja diharapkan sebagai sebuah solusi untuk menjawab permasalahan pengelolaan anggaran.

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. Untuk melakukan perhitungan ASB, menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, unit kerja terkait terlebih dahulu harus mengelompokkan belanja menjadi belanja langsung dan tak langsung. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input alokasi belanja yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Belanja langsung umumnya berkaitan dengan investasi pemerintah yang berimplikasi langsung pada kepentingan rakyat. Semakin besar alokasi belanja langsung dalam APBD, akan semakin mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran.

Aliran dana yang meningkat ke masyarakat melalui belanja langsung diharapkan akan memberikan efek terhadap kesejahteraan masyarakat, dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pedesaan dan perkotaan disajikan pada Tabel 1. Pada Tabel 1 jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan diperkotaan, yang artinya dalam alokasi anggaran pendapatan pemerintah daerah harus lebih memperhatikan program dan aktivitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, sehingga mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan output atau perambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan keharusan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan akan berkurang apabila pertumbuhan ekonomi menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara

langsung harus dipastikan pertumbuhan itu terjadi ditempat penduduk miskin bekerja seperti; pertanian atau sektor yang padat karya.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2007 – 2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2007	119.8	109.3	229.1	6.01	7.47	6.63
2008	115.1	100.6	215.7	5.7	6.81	6.17
2009	92.1	89.7	181.7	4.5	5.98	5.13
2010	83.6	91.3	174.9	4.04	6.02	4.88
2011	92.9	73.3	166.2	3.91	4.65	4.2

Sumber: <http://bali.bps.go.id>, 2015

Tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi di Bali menunjukkan perekonomian di kabupaten/kota di provinsi Bali belum merata. Penyebab kesenjangan ekonomi di provinsi Bali apabila dikaitkan dengan struktur perekonomian adalah persebaran yang tidak merata dari titik-titik destinasi pariwisata sehingga terdapat ketimpabangan dalam menikmati benefit ekonomi dan aktivitas pariwisata.

Adisasmita (2011) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan melihat hasil analisis elastisitas PAD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Priyo (2006) menyatakan bahwa belanja pembangunan merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan yang kuat antara belanja pembangunan dengan tingkat desentralisasi yang mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Adi dkk. (2006) mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan PAD se Jawa Bali, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi Pemda kabupaten dan kota masih kecil, sehingga penerimaan PADnya pun kecil. Sedangkan belanja pembangunan memberikan dampak yang positif terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah belanja langsung dalam APBD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh biaya langsung, pertumbuhan ekonomi pada tingkat kemiskinan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk

- 1) mengetahui pengaruh belanja langsung pada pertumbuhan ekonomi,
- 2) mengetahui pengaruh belanja langsung pada tingkat kemiskinan
- 3) mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi pada tingkat kemiskinan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris peningkatan belanja langsung dalam APBD dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan kemiskinan dengan menggunakan belanja langsung sebagai penggerak.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu kontrak yang terdiri dari agen sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk suatu tugas dan prinsipal

sebagai pihak yang memberi tugas. Kondisi ini mengandung konsekuensi bahwa kedua belah pihak baik agen maupun prinsipal akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (Jensen & Meckling, 1976). Adanya pemisahan antara agen dan prinsipal menimbulkan masalah keagenan (agency problem). Masalah ini timbul karena adanya kecenderungan dari manajemen untuk melakukan moral hazard dalam memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak prinsipal.

Teori agensi berusaha mendeskripsi hubungan antara agen dan prinsipal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Teori agensi menggunakan penekanan pada penyelesaian dua masalah yaitu: a) masalah agensi yang muncul ketika keinginan/tujuan antara agen dan prinsipal bertentangan, dan sulit bagi prinsipal untuk memverifikasi hasil kerja agen yang sesungguhnya. b) masalah risk sharing (penanggung bersama) yang terjadi ketika prinsipal dan agen mempunyai preferensi dan sikap yang berbeda terhadap suatu resiko. Fokus teori agensi (Eisenhardt, 1989) adalah penentuan kontrak yang paling efisien yang mengatur hubungan antara prinsipal-agen dengan asumsi bahwa: a) manusia mempunyai sifat mementingkan kepentingan diri sendiri, bounded rationality risk aversion b) organisasi meliputi konflik kepentingan antar anggotanya, dan c) informasi merupakan suatu komoditi dan dapat dibeli.

Anggaran merupakan salah satu elemen sistem perencanaan dan pengawasan jalannya operasional pemerintahan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBD berlaku hubungan keagenan antara ekektuf sebagai agen dan masyarakat (DPRD) sebagai Prinsipal. Anggaran merupakan dokumen kontrak politik antara eksekutif dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009). Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode tertentu (Garrison at al., 2007). Anggaran merupakan rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang formal. Tindakan penyusunan anggaran disebut dengan penganggaran (budgeting).

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses pembentukan anggaran. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa wujud penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yang secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan anggaran yang memadai sebagai langkah awal dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Secara operasional anggaran disusun oleh pihak eksekutif yang kemudian dimintakan persetujuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam kondisi seperti itu eksekutif akan berusaha menyusun anggaran yang berpihak pada kepentingan prinsipal untuk mendapatkan persetujuan legislatif. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, memberikan suatu kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Undang-Ungang tersebut menggeser paradibma pemerintah sentralistis menuju sistem yang desentralistis. Dalam situasi demikian, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber daya (resource) yang ada di daerahnya masing-masing secara lebih optimal. Dengan demikian, perlu ada perumusan kembali strategi melalui implementasi sistem perencanaan yang lebih komprehensif dan sistematis.

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu, baik antara sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air (Kartasasmita, 1996). Selanjutnya disebutkan aspek-aspek pokok dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang didasarkan pada prinsip- prinsip : (a) negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan oleh karenanya hubungan antar pemerintah pusat dan

pemerintah daerah di bawahnya sudah tentu dalam kerangka negara kesatuan;(b) di dalam negara kesatuan, tidak dibenarkan adanya negara di dalam negara;(c) mengingat adanya perbedaan dalam perkembangannya antar daerah, maka pengaturan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedangkan pelaksanaannya dapat menempuh salah satu asas atau kombinasi antar ketiganya sesuai dengan permasalahan atau urusan yang dihadapi serta tingkat perkembangan daerahnya; (d) otonomi daerah itu sendiri seharusnya bukanlah tujuan akhir karena tujuan adanya daerah otonomi adalah sama dengan tujuan negara dan otonomi daerah merupakan cara untuk mencapai tujuan itu dan (e) otonomi daerah tidak didasarkan pada faktor primordial seperti ras, suku, agama sedangkan penduduk daerah otonomi tidak perlu dibedakan antara asli dan pendatang.

Konsepsi otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menggunakan otonomi seluas-luasnya. Kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus seluas-luasnya semua urusan pemerintah (pusat). Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dalam menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Salah satu implikasi adanya otonomi daerah adalah daerah memiliki wewenang yang jauh lebih besar dalam mengelola daerahnya baik itu dari sisi pelaksanaan pembangunan maupun dari sisi pembiayaan pembangunan. Aspek pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang mendasar dan strategis, baik pembangunan ekonomi makro maupun pembangunan ekonomi mikro. Perkembangan kondisi umum perekonomian merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ekonomi makro ditandai dengan peningkatan pendapatan domestik regional bruto (PDRB), kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pendapatan asli daerah (PAD) dan Perumbuhan investasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012, menyatakan bahwa alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. Untuk melakukan perhitungan ASB, unit kerja terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja yang terdiri dari belanjak langsung dan belanja tak langsung. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Belanja langsung umumnya berkaitan dengan investasi pemerintah yang berimplikasi langsung pada kepentingan rakyat. Semakin besar alokasi belanja langsung dalam APBD, akan semakin mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kuznets dalam Novianto dan Wibowo, 2003, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada. Masing-masing dari ketiga komponen pokok, yaitu : Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan ekonomi (economic maturity) di suatu negara yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan; ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi, disamping perkembangan atau kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain). Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi inovasi sosial berarti potensi ada, akan tetapi tanpa input komplementernya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun.

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai ekspansi dari kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa dari suatu perekonomian atau ekspansi dari kemungkinan memproduksi (production possibilities) suatu perekonomian. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini adalah output yang dihasilkan dari input-input yang diperkirakan dalam harga pada suatu tahun dasar (base year) atau disebut juga PDRB pada harga konstan (constant prices).

Banyak definisi tentang kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan. Kemiskinan telah didefinisikan berbeda-beda dan merefleksikan suatu spektrum orientasi ideologi. Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Parwoto, 2001). Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau asasi manusia seperti sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang. Lebih jauh lagi, kemiskinan dipandang tidak hanya menyangkut standar pendapatan atau konsumsi yang rendah melainkan juga rendahnya kebebasan berpolitik dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal tersebut berkaitan pula dengan keterbatasan fasilitas umum, pilihan, kesempatan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas

Kemiskinan menurut World Bank sebagai kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi diantaranya rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Garis kemiskinan menurut Kuncoro (2010) adalah semua ukuran kemiskinan yang dipertimbangkan berdasarkan norma-norma tertentu. Arsyad (2010) membagi kemiskinan menjadi dua yaitu: (1) Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum dengan pendapatan yang diterimanya maka dia dikatakan miskin. (2) Kemiskinan relatif, disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Walaupun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun bila pendapatan masyarakat sekitarnya lebih tinggi, maka orang tersebut masih dalam kategori miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali alasan pemilihan lokasi penelitian karena pertumbuhan perekonomian Bali umumnya didorong oleh sektor pariwisata sebagai leading sector dan persentase penduduk miskin masih tinggi. Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Pengentasan Kemiskinan dijelaskan oleh biaya langsung dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan dua variabel dependen (terikat) dan satu variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu persentase belanja langsung dalam APBD. Definisi operasional dari variabel yang akan diteliti disajikan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi (Economic GrowthEG) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. EG diukur dengan prosentase perubahan produk domestik regional bruto (PDRB)
- Penduduk Miskin di Provinsi Bali adalah Penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan di Provinsi Bali. Pengentasan kemiskinan diukur dengan tingkat penduduk miskin (TPM) yaitu persentase penduduk miskin.
- Belanja Langsung (Dana Bagi Hasil -DBH) adalah persentase dari belanja langsung yang dialokasikan dibandingkan dengan total belanja dalam APBD.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data arsip. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari instansi pemerintah yang telah dipublikasikan dan data yang diolah kembali dari data sekunder yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bapenas atau lembaga pemerintah yang diakui dan mempunyai legalitas dalam menerbitkan data statistik di Indonesia. Sumber data lainnya adalah berbagai website serta berbagai instansi dan literatur-literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu data persentase penduduk miskin, PDRB Kabupaten/kota di provinsi Bali, data mengenai dana bagi hasil atau belanja langsung. Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, buku referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi yang terkait dengan penelitian ini.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode regresi dua tahap. Regresi pertama menguji pengaruh biaya langsung pada pertumbuhan ekonomi, dan regresi linear yang ke dua menguji pengaruh biaya langsung dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat kemiskinan. Adapun rumus regresi linear dia tahap yang digunakan disajikan berikut ini.

$$EG = \alpha_1 + \beta_1 DBH + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$TPM = \alpha_2 + \beta_2 EG + \beta_3 DBH + \varepsilon_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

EG = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

DBH = Persentase Biaya Langsung terhadap total belanja

TPM = Tingkat Penduduk Miskin

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, agar hasil penelitian tidak bias, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik terhadap data yang dianalisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di delapan kabupaten dan 1 kota di provinsi Bali. Data penelitian ini dikutip dari laporan realisasi anggaran dan pendapatan tiap-tiap kabupaten /kota selama kurun waktu lima tahun. Jumlah data yang dianalisis sebanyak 45 (empat puluh lima) laporan realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Pada Tabel 2 berikut ini disajikan deskripsi dari tiap-tiap variabel penelitian.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Sampel	Minimum	Maximum	Rata-Rata	Deviasi Standar
TPM	45	3,02	6,16	5,11	0,93
EG	45	3.42	22,52	13,04	4,44
DBH	45	0,03	6,82	1,50	1,96

Sumber: Data diolah , 2015

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui rata-rata penduduk miskin di provinsi bali sebesar 5,11 persen dari rata-rata jumlah penduduk dari tahun 2010 s.d 2014. Tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 13,04 persen. Artinya, rata perubahan produk regional bruto selam lima tahun terakhir sebesar 13,04 persen. Hasil ini lebih baik dari kinerja perekonomian Bali selama periode 2006-2013 terlihat dari besarnya PDRB yang tumbuh dengan laju rata-rata 5,94 persen sama dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya PDRB di Provinsi Bali turut berkontribusi sebesar 2, 12 persen terhadap pembentukan PDRB Jawa Bali, dan menyumbang sebesar 1,25 persen terhadap pembentukan PDB nasional (BPPS, 2013)

Dana bagi hasil atau biaya langsung untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi Bali sebesar 1, 50 persen selama lima tahun terakhir. Hal ini berarti Rata-rata 1,50 persen pendapatan asli daerah digunakan untuk belanja langsung. Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat non excludable dan atau non rivalry memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa hal tersebut, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Bali. Rasio belanja modal di Provinsi Bali pada tahun 2013 sebesar 15,86 persen dan rasio belanja pegawai sebesar 19,04 persen Untuk itu, perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta..

Penelitian ini menggunakan model regresi untuk menguji pengaruh belanja langsung, pertumbuhan ekonomi pada pengentasan kemiskinan. Sebelum dilakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dengan tujuan agas hasil yang diperoleh dari analisis regresi tidak bias

akibat tidak terpenuhinya syarat dari model. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan disajikan pada Tabel 3

Tabel 3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas p-value	Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	Autokorelasi (Durbin-Watson)
	Tolerance	VIF			
EG	0,854	1,171	1,00		
DBH	0,854	1,171	1,00		
D-W					2,098
C ²				0,225	

Sumber : Data Diolah, 2015

Hasil uji regresi pengaruh belanja langsung pada pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa Belanja langsung berpengaruh positif signifikan ($p\text{-value} = 0,009 < 0,05$) pada pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa nilai unstandardized coefficients $\beta = 0,868$ dan nilai t sebesar 2,716. Hal ini menunjukkan bahwa apabila belanja langsung meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pengujian pengaruh biaya langsung, pertumbuhan ekonomi pada tingkat kemiskinan, diuji dengan regresi linear berganda. Tabel 4 menunjukkan hasil uji regresi.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficient		t	p-value
	β	Std.Error		
Constanta	10,441	2,185	4,778	0,000
EG	-0,043	0,020	-2,181	0,035
DBH	-0,344	0,044	-7,768	0,000
F-test	45,725			0,000
Adjusted R ²	0,670			

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan, karena nilai F-test 45,725 dengan nilai $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$. Nilai adjusted R² sebesar 67 persen, artinya ada 43 persen variabel lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan tidak dimasukkan dalam model regresi. Hasil uji t menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan pada tingkat kemiskinan. Nilai t sebesar (-2,181) dengan $p\text{-value} 0,035 < 0,05$. Belanja langsung berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan dengan nilai t (-7,768) dan $p\text{-value}$ nya sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 4,3 persen menyebabkan tingkat kemiskinan menurun 1 persen. Apabila belanja langsung meningkat 34,4 persen menyebabkan tingkat kemiskinan menurun 1 persen. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh lebih besar pada tingkat kemiskinan dibandingkan dengan dana bagi hasil.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang harus ditangani secara intensif dan berkesinambungan dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidak berdayaan/ ketidakmampuan dalam hal:

- (1) memenuhi kebutuhan –kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan;
- (2) melakukan kegiatan usaha produktif;
- (3) menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonom;

- (4) menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik;
- (5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bali untuk mengatasi kemiskinan seperti menyediakan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian. Agar program tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan dana khusus yang seharusnya di anggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran itu disebut sebagai belanja langsung.

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. Untuk melakukan perhitungan ASB, unit kerja terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear, di peroleh hasil bahwa belanja langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota di provinsi Bali. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi alokasi APBD untuk belanja langsung menyebabkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Semakin besar alokasi APBD untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan publik, maka senjangan pendapat antar rumah tangga dapat dikurangi. Hal ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil regresi linear pada tahap kedua, menguji pengaruh biaya langsung dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Hal ini berarti semakin tinggi alokasi APBD untuk program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan menyebabkan semakin menurun tingkat kemiskinan masyarakat. Strategi penanggulangan kemiskinan yang dibuat untuk penanggulangan kemiskinan adalah strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ada empat strategi yaitu (1) meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui peningkatan produktivita penduduk miskin. (2) mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara umum program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh kabupaten/ kota di provinsi Bali dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: (1) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas masyarakat miskin. (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. (3) Kelompok program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan kegiatan dalam perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2010). Selain faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik ada dua faktor penting yang mempengaruhi pola tersebut, yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern (Temenggung, 1997:241-242).

Pertumbuhan ekonomi merupakan menunjukkan keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2011). Peningkatan pertumbuhan ekonomi berarti terjadi kenaikan pendapatan perkapita daerah yang mengakibatkan angka kemiskinan turun. Namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti berikut; (1) Pentingnya membatasi dan menyeleksi impor yang masuk, baik barang dan jasa. (2) Mengurangi ketergantungan terhadap ekspor. Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor. (3) yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. (4) Mengurangi ketergantungan pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan. (5) Dalam jangka menengah kondisi ini akan mengurangi potensi tabungan masyarakat. Padahal tabungan sangat penting bagi perekonomian karena dapat menjadi sumber investasi sektor produktif melalui intermediasi perbankan. (6) Mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam perekonomian daerah.

Prospek pertumbuhan daerah di masa yang akan datang ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Posisi geografis Bali yang strategis merupakan modal pembangunan di Bali. Bali merupakan daya tarik wisata utama di Indonesia sehingga pengembangan industri pariwisata di Bali perlu diperhatikan dengan meningkatkan investasi swasta di bidang ini. Dukungan infrastruktur terutama bandara dan pelabuhan, serta jadwal penerbangan yang rutin dari dan menuju negara-negara utama tempat asal wisatawan asing merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pariwisata di Bali. Bali juga memiliki beberapa komoditas unggulan selain pariwisata, terutama bahan pangan seperti padi, sapi, babi dan perikanan. Komoditas ini bukan hanya untuk memenuhi konsumsi di dalam provinsi Bali namun juga dapat diekspor ke daerah lain. Dengan keunggulan tersebut, Provinsi Bali dapat mengembangkan komoditas tersebut sebagai ikon dan penggerak perekonomian daerah yang didukung dengan industri pengolahan yang baik untuk memberikan nilai tambah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa belanja langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan dan belanja langsung berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena Belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, dan wawancara hanya untuk menguatkan hasil penelitian. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan metoda survei dan wawancara secara mendalam untuk menegaskan hasil penelitian ini. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat lebih banyak mengalokasikan APBD nya untuk biaya langsung yang khusus untuk dana penanggulangan dan pengendalian kemiskinan.

Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusinya. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusinya maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sehingga mengurangi jumlah penduduk yang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardji. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah Edisi I: Ghara Ilmu*; Jakarta
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi ketiga*, BPFE, Yogyakarta
- Departemen Dalam Negeri RI, 2000a. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Eisenhardt. 1989. *Agency Theory. An Assesment and Review. Accounting of Management review* pp 57-74.
- Garrison, Noreen, Brewer. 2007. *Managerial Accounting The McGraw-Hill Companies, Inc.*
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics Vol.3.No.4. pp 305-360.*
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik UPP STIM YKPN*: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Edisi IV: Andi*. Yogyakarta.
- Novianto dan Dwi Wibowo. 2003. *Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Buletin Pangsa Edisi 10/IX.*
- Kuncoro, Mudrajat, 2010. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bagian Penerbitan AMP YKPN*, Yogyakarta.
- Temenggung, S.A, 1997, *Paradigma Ekonomi Wilayah : Tinjauan Teori dan Praktis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan, dalam BTS. Soegijoko dan BS. Kusbiantoro (penyunting), Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia penerbit PT. Grasindo, Jakarta.*
- Sumitro Djojohadikusumo, 1995, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan Penerbit LP3ES, Jakarta.*

- Parwoto. 2001. Makalah Penanggulangan Kemiskinan (Unpublished. Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana Wilayah, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012
- UNDP. 2000. Overcoming Human Poverty United Nations Development Programme. Poverty Report 2000
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.